

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa deskripsi *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang telah cukup baik dengan susunan hasil analisis secara rinci, sebagai berikut :

1. Kondisi awal menjadikan atensi yang banyak dari multi *stakeholders* menjadikan kondisi awal kolaborasi telah cukup baik, sehingga selama jumlah *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas masih banyak, maka akan tetap menghadirkan keberlanjutan kolaborasi.
2. Desain kelembagaan kolaborasi diwujudkan dalam kejelasan aturan dasar berupa fokus intervensi fokus kelurahan di Kota Semarang serta pembaharuan regulasi berupa Perwal No. 45 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Rembuk *stunting* sebagai perwujudan rapat menyeluruh *stakeholders* di wujudkan secara partisipasi yang inklusif dalam kolaborasi. Eksklusivitas forum kolaborasi dibuktikan dengan setiap kelurahan di Kota Semarang memiliki kolaborasi penanganan *stunting* masing-masing yang terintegrasi dengan SiBening Kota Semarang. Tersedianya publikasi untuk mengawal naik dan turunnya *stunting* secara bulanan di laman resmi Bappeda Kota Semarang.
3. Kepemimpinan fasilitatif pada kolaborasi telah cukup baik dinilai dari pengelolaan bantuan oleh pemerintah kota dan pemerintah perangkat kelurahan dari non TPPS yang tidak berbelit-belit hanya dengan izin kepada Lurah.

Keberjalanan mediasi sebagai wadah perundingan untuk menyusun kesepakatan kolaborasi cukup baik ketiga pimpinan kolaborasi dengan ruang berbeda, yakni Bappeda Kota Semarang, Lurah Tanjung Mas, dan Ketua PKK. Pemberdayaan dalam kolaborasi cukup baik meninjau bentuk penanganan *stunting* dari pemerintah yang bersifat pemberdayaan, keterlibatan Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Tanjung Mas untuk menggerakkan pemberdayaan melalui kader *stunting* dari masyarakat dibantu dengan kontribusi *stakeholder* non TPPS.

4. Proses kolaboratif yang memiliki tahapan cukup baik terdapat pada tahapan dialog tatap muka dengan adanya komunikasi mendalam dari *stakeholders* yang melakukan teknis kolaborasi diwujudkan dalam bentuk pertemuan lintas sektor dari Rembuk *Stunting*; pembangunan kepercayaan pemerintah diwujudkan melalui Stranas *Stunting* termuat khusus di setiap wilayah berupa Perwal Kota Semarang No. 45 Tahun 2023 menjelaskan adanya Kolaborasi Lintas Sektor TPPS dan keterbukaan pada pihak non TPPS; dan Hasil antara berupa arah keberlanjutan berupa Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku berupa Forum Anak dijalankan sebagai upaya dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat Kelurahan Tanjung Mas sebagai pemberdayaan yang solutif.

Faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang diidentifikasi sebagai berikut :

A. Faktor pendukung *collaborative governance*

1. Struktur jaringan dalam struktur sosial dalam *collaborative governance* mendukung optimalisasi kolaborasi dengan adanya desentralisasi dari pusat ke

wilayah Kota Semarang menjadikan para *stakeholder* saling bertalian untuk mengimplementasikan fokus intervensi di setiap kelurahan.

2. Faktor kultural telah cukup baik dari sisi SDM non masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas, yakni telah berpendidikan dan memiliki keahlian di bidangnya. TPPS Kota Semarang telah terbagi secara peranan untuk menangani *stunting*. Telah dimulainya bentuk edukasi dan pelatihan untuk kader-kader *stunting*. Komunikasi kolaborasi telah cukup baik dengan adanya interaksi Lurah dengan pihak yang datang untuk menerjukkan bantuan yang tidak harus melakukan prosedur berbelit-belit untuk melapor pada Bappeda Kota Semarang. Terdapat rutinitas pelaporan dinamika *stunting* setiap bulan dipimpin oleh Ketua PKK. Partisipasi kolaborasi cukup baik dengan keterlibatan bantuan perusahaan, CSR, serta akademisi yang memberikan pengabdian masyarakat.
3. Faktor kepentingan pemerintah pada gagasan yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang dalam kepemimpinan inovatif cukup baik dengan hadirnya SiBening, Dapur Sehat, Rumah Pelita, dan Forum anak. Konsistensi kesepakatan cukup baik dengan implementasi Forum Anak setiap 3 minggu sekali sebagai implementasi Strakom Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### B. Faktor penghambat collaborative governance

1. Faktor struktur sosial belum cukup baik dari komitmen sisi masyarakat, termasuk kader *stunting* yang dibuktikan dengan masih ditemukan masyarakat yang sulit menghadiri mediasi *stunting*, sulit menghadiri agenda Posyandu, serta masih banyak masyarakat meremehkan tablet tambah darah saat hamil.

2. Faktor kultural berupa SDM sisi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas belum cukup baik karena masih ditemukan banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pentingnya pola asuh dan pemahaman gizi yang baik akibat wilayah yang kumuh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat melakukan pernikahan anak demi ketahanan keluarga. Partisipasi kolaborasi dari komitmen kader *stunting* belum baik karena kurangnya pendanaan serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mengajak anaknya ke Posyandu setiap bulan dan melakukan mediasi *stunting* setiap bulannya.
3. Faktor kepentingan pemerintah dalam kepemimpinan fasilitatif dalam implementasinya belum cukup untuk mengatasi permasalahan faktor alam berupa kendala sanitasi, banjir, dan rob. Konsistensi kesepakatan untuk perbaikan sanitasi di Kelurahan Tanjung Mas belum cukup baik karena pemerintah belum mampu mengupayakan masyarakat untuk menyetujui penyediaan *septic tank* di setiap rumah dan menyelesaikan permasalahan lahan.

Ditemukannya faktor lainnya yang menyumbang faktor penghambat *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yaitu sumber daya modal (pendanaan). Terdapat kekurangan anggaran pada pendistribusian PMT untuk anak *stunting*, ibu hamil KEK dan kader *stunting* yang dipicu dari kurangnya dana dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka rekomendasi yang diberikan agar proses *Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di

kelurahan Tanjung Mas dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan yaitu:

1. Melakukan renovasi pada Rumah Pelita di Kelurahan Bandarharjo untuk memperbaiki daya tampung untuk lingkup Semarang Utara
2. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan kader dengan memperbaiki dan menambah alokasi dana untuk kader *stunting* agar menambah motivasi kader dalam mengupayakan keberjalanan upaya penanganan *stunting* secara maksimal.
3. Meningkatkan peran DP3A Kota Semarang sebagai payung bagi keberjalanan PKK dan Posyandu agar mampu mengoptimisasi PKK dan Posyandu dengan penyuluhan teknik jemput bola kepada masyarakat yang tidak berangkat mediasi dan memastikan seluruh ibu hamil meminum tablet tambah darah.
4. Menambahkan pihak pengawas yang kredibel untuk keberjalanan Posyandu agar terjadi keakuratan dalam pendataan setiap bulannya
5. Meningkatkan kinerja TPK dalam pendampingan secara komprehensif berupa pendampingan gizi, psikologis, finansial, dan spiritual untuk keluarga berisiko *stunting* dan berupaya menghadirkan lingkungan masyarakat yang mendukung Perubahan Perilaku menghindari pernikahan anak dan ketidaksiapan pernikahan
6. Evaluasi dari sisi lama media Kota Semarang untuk memperbaharui publikasi regulasi terbaru berupa Perwal No. 45 Tahun 2023.
7. Melakukan mediasi dari pemerintah kepada *stakeholder* non TPPS yang seringkali menerjukkan bantuan untuk berdiskusi terkait keberlanjutan bantuan setiap periode agar hasilnya dapat terlihat meskipun dalam durasi singkat.

Rekomendasi yang diberikan agar memperbaiki faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam penanganan *stunting* di kelurahan Tanjung Mas yaitu::

1. Meningkatkan peran PKK serta Posyandu remaja untuk melakukan rutinitas himbauan kepada masyarakat serta terjun secara langsung kepada masyarakat untuk penanganan *stunting* dengan melakukan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi masyarakat agar sadar akan dampak *stunting*
2. Melakukan bentuk kolaborasi yang solutif dengan menitikberatkan pada tujuan perubahan perilaku kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Mas dengan memutus budaya ketidaksiapan pernikahan karena keperluan pemenuhan gizi yang baik untuk anak. Dalam melakukan tujuan merubah persepsi masyarakat tentang pernikahan anak dan mental kemiskinan, dibutuhkan dukungan alokasi dana yang optimal agar kader *stunting* lebih bekerja secara maksimal.
3. Pemerintah kota dan kelurahan harus melakukan kebijakan solutif untuk memperbaiki sanitasi Kelurahan Tanjung Mas secara khusus dengan menambah anggaran biaya lebih untuk pembuatan *septic tank* setiap rumah dan keberjalanan SPALDT, memfasilitasi masyarakat dengan menyelesaikan konflik lahan, serta mengawal kendala lingkungan berupa banjir dan rob yang dialihkan menjadi permasalahan nasional.

Pemberian saran atas kurangnya anggaran *stunting* dalam faktor lainnya *Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di kelurahan Tanjung Mas yakni penerapan anggaran *problem-based* yang akan diterapkan pada tahun 2024 secara maksimal dengan perhatian lebih pada alokasi anggaran khusus di wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang memiliki permasalahan wilayah paling kompleks.